



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 37 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 43 TAHUN 2021 TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2021-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengimplementasikan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2021-2024, perlu dilakukan perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 43 Tahun 2021 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 43 Tahun 2021 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 43 TAHUN 2021 TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2021-2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 43 Tahun 2021 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2024 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 Nomor 43) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Belitung Timur.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
6. Tim Pengarah adalah Tim Pengarah pada Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
7. Tim Pelaksana adalah Tim Pelaksana pada Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.

8. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Kemen PAN-RB adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.
9. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
10. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan Informatika, bidang statistik dan bidang persandian Kabupaten Belitung Timur.
11. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal Kabupaten Belitung Timur
12. Dinas Kesehatan adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan Kabupaten Belitung Timur.
13. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah Badan yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan serta fungsi penunjang penelitian dan pengembangan.
14. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah adalah badan yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan.
15. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah badan yang melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.
16. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
17. Bagian Organisasi adalah Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
18. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Aparat Pengawas Intern Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Timur yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5(lima) tahun kedepan.
20. Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat RB adalah proses menata ulang birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berpikir diluar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma dan dengan upaya luar biasa.
21. *Grand Design* Reformasi Birokrasi adalah rancangan induk yang berisi arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu 2010-2025.
22. Road Map Reformasi Birokrasi adalah dokumen dalam bentuk operasionalisasi *Grand Design* Reformasi Birokrasi (GDRB) yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci pelaksanaan reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama 5 (lima) tahun dengan sasaran pertahun yang jelas.

23. Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Belitung Timur yang selanjutnya disebut Road Map Reformasi Birokrasi adalah rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2024.
24. Reformasi Birokrasi General adalah upaya yang berfokus pada perbaikan sistem dan tata kelola internal pada instansi pemerintah.
25. Reformasi Birokrasi Tematik adalah upaya dan sarana untuk mengurai dan menjawab atau mengatasi akar permasalahan tata kelola pemerintahan (*debottlenecking*) yang memang dirasakan secara langsung oleh masyarakat.
26. Rencana Aksi Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Rencana Aksi RB General dan Rencana Aksi RB Tematik Pemerintah Kabupaten Belitung Timur adalah langkah-langkah rinci yang diambil untuk mencapai sasaran tujuan jangka panjang atau jangka pendek pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Belitung Timur tahun 2023-2026.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	:	PENDAHULUAN.
BAB II	:	GAMBARAN BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR.
BAB III	:	AGENDA REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2021-2024.
BAB IV	:	MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI.
BAB V	:	PENUTUP.
- (3) Pelaksanaan *Road Map* Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijabarkan dalam Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2024.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 30 Oktober 2023
BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BURHANUDIN

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 30 Oktober 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

SAYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

AMRULLAH, S.H.
NIP.19710602 200604 1 005

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 37 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 43 TAHUN 2021 TENTANG ROAD MAP REFORMASI
BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN
2021-2024.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai *good governance* dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur.

Dengan adanya perubahan regulasi terkait dengan arahan Presiden untuk mewujudkan birokrasi yang mampu menciptakan hasil, birokrasi yang mampu menjamin agar manfaat kebijakan itu dirasakan oleh masyarakat (*making delivered*), serta birokrasi yang lincah dan cepat (*agile bureaucracy*) maka pada Tahun 2023 ini dilakukan penajaman terhadap Road Map Reformasi Birokrasi 2021-2024 dengan tujuan “Birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik.”

Perubahan Road Map ini diharapkan dapat menjawab isu utama RB yang berkembang yang terkait dengan dampak dan kontribusi RB pada pembangunan Nasional, peningkatan kualitas pelayanan publik, penciptaan pemerintah yang bersih dan bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme serta peningkatan daya saing Indonesia dibanding dengan negara lainnya. Penajaman terhadap fokus pelaksanaan RB diharapkan dapat menyelesaikan isu hulu dan isu hilir yaitu sasaran RB General bertujuan untuk menyelesaikan masalah tata kelola pemerintahan yang terjadi di internal Birokrasi dan sasaran RB Tematik dengan yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang muncul di masyarakat dan terkait dengan agenda prioritas Pembangunan Nasional. Penetapan target dan rencana pelaksanaan kegiatan RB diselaraskan dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Belitung Timur dan Rencana Strategis PD, hal ini bertujuan untuk menjamin terlaksananya tujuan dan sasaran RB di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.

BAB 1

PENDAHULUAN

Terjadinya penyesuaian terhadap perubahan kebijakan nasional terkait dengan pelaksanaan RB merupakan hal yang mendorong pemerintah untuk melakukan penyesuaian pelaksanaan RB dengan membenahi transformasi digital dalam penyelenggaraan tatakelola pemerintahan yang baik. Selain itu, RB yang ada saat ini belum berdampak nyata dan fokus pada manfaat yang secara langsung dirasakan oleh masyarakat dan perbandingan capaian terkini dengan kondisi akhir yang diharapkan pada akhir tahun 2025 terlihat gap yang cukup jauh.

Beberapa upaya RB masih berfokus pada proses dan belum sepenuhnya berfokus pada manfaat yang secara langsung dirasakan masyarakat.

Secara khusus, aspek utama yang perlu ditajamkan dari *Road Map* RB 2021–2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Substansi tujuan, sasaran, dan indikator keberhasilan RB dalam *Road Map* RB Kabupaten perlu dilakukan perubahan untuk menjawab isu strategis pembangunan di daerah Kabupaten Belitung Timur yang terkait dengan, daya saing daerah, dan isu-isu strategis lainnya yang perlu dijawab dengan akselerasi RB.
- 2) Sasaran program pembangunan bersifat lintas sektor (*cross cutting issue*), sehingga memerlukan strategi RB dalam percepatan pencapaian sasaran lintas sektor dan instansi. Kebijakan-kebijakan RB diharapkan menjadi kebijakan kunci yang paling berkontribusi terhadap sasaran strategis dan tujuan RB.
- 3) Pengelolaan RB yang fokus untuk percepatan pencapaian tujuan dan sasaran strategis RB dengan penyelesaian terhadap akar masalah melalui perbaikan sistem dan manajemen internal, serta isu prioritas antara lain kemiskinan dan investasi.
- 4) Kolaborasi pelaksanaan RB yang cenderung silo (*fragmented*) khususnya antara PD pengampu indeks dapat berdampak pada pengukuran RB yang tidak efektif, sehingga dibutuhkan indikator RB yang paling relevan dan signifikan untuk mengukur keberhasilan RB, sehingga diperlukan penyederhanaan, sinergi dan integrasi antar indikator kinerja yang sejenis.

BAB II GAMBARAN BIROKRASI KABUPATEN BELITUNG TIMUR

II.1 Isu Strategis RB Tahun 2021-2024

Isu strategis yang menjadi permasalahan, tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan RB datang dari hulu dan hilir, hal ini harus diantisipasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan sebagaimana yang dicita-citakan pada tahun 2024.

II.1.1. Isu Strategis di Tingkat Hulu

1) Birokrasi yang Belum Kolaboratif

Masih perlu peningkatan efektivitas peran aktor dan sektor dalam kolaborasi dan integrasi untuk mencapai tujuan, sasaran dan strategi pelaksanaan RB.

2) Transformasi Digital yang Belum Optimal

Implementasi SPBE menurut hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian PANRB, di Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2022 masih di angka 2,70 dari skala 0-5. Untuk itu masih diperlukan penguatan dan percepatan implementasi SPBE secara berkelanjutan dalam rangka perbaikan perencanaan dan integrasi sistem pelayanan pemerintahan.

3) Penyederhanaan Struktur kerja baru yang belum tuntas

Belum sepenuhnya melaksanakan Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi.

4) Integritas penyelenggaraan Pemerintah yang masih menghadapi kendala

Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Belitung Timur perlu meningkatkan kapabilitas APIP yang masih di level 2, masih perlu dilakukan monitoring terhadap implementasi kebijakan benturan kepentingan, *Whistleblowing System*, pengaduan masyarakat, dan pengendalian gratifikasi.

5) Budaya Birokrasi: BerAKHLAK yang belum terimplementasi dengan baik

Belum seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur memahami Budaya Kerja BerAKHLAK, sehingga perlu diinternalisasikan kepada ASN agar menerapkan berperilaku ASN Ber AKHLAK dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

II.1.2. Isu Strategis di tingkat Hilir:

Isu strategis yang muncul di masyarakat terkait dengan agenda program pembangunan Daerah Kabupaten Belitung Timur. Isu hilir akan terjadi jika isu hulu tidak bisa diselesaikan. Adapun isu hilir yang berkaitan dengan pelaksanaan RB:

- 1) Hasil pelaksanaan program pengentasan kemiskinan belum sebanding dengan sumber daya yang dikeluarkan.
Total anggaran pengentasan kemiskinan pada tahun 2021 Rp. 301.904. 025. 295,00 Dengan anggaran diatas hanya mampu menurunkan 0,7% dari 7,20% (data 2021) menjadi 6,49% (data 2022).
Dalam rangka percepatan pencapaian Sasaran Pemerintah Kabupaten Belitung Timur terus menjalin kerjasama/berkolaborasi dengan pihak ketiga diluar instansi guna mencapai target output dan lokus kegiatan diantaranya program CSR (PT. Timah, Perusahaan Sawit dan PerBANKAN).
- 2) Tantangan resesi global dan pentingnya investasi.
- 3) Tantangan perubahan global dan tuntutan terhadap pelayanan publik.
- 4) Dampak inflasi yang tidak terkendali.

Kondisi eksisting sesuai dengan Road Map RB 2021-2024 indikator-indikator RB:

Target Kinerja Tujuan RB
Tabel 2.1

NO	TUJUAN RB NASIONAL 2020-2024	INDIKATOR RB	ROAD MAP RB NASIONAL 2024	TARGET RPJMD 2024	KONDISI /EKSISTING TH 2022
1.	Terwujudnya Birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan public	Capaian Indeks Reformasi Birokrasi	Baik	65 (Nilai)	58,20
		Capaian Indikator Kinerja Pembangunan (Angka Kemiskinan, Pertumbuhan Investasi)	Angka Kemiskinan: 9,71 (Sept 2021) Pertumbuhan	5,88 (Persen) 402,814	6,49 (Persen)

			Investasi= 9,0% (2021/2020)	(Juta Rupiah)	- 472.466 (Juta Rupiah) (2021)
			Penanaman Modal 2021: 901,0		-1.373.500 (2022)
			Realisasi Penanaman Modal 2020: 826,3		
		Capaian tiga Indikator Daya Saing Global (CPI, EGDI)	CPI: Skor 38 Peringkat 96 dari 180 negara (2021) EGDI: Peringkat ke 88	1,64 (Skor 1-5)	Indeks Daya saing Daerah 2,53 (2022)

Target Kinerja Sasaran Strategis RB
Tabel 2.2

No	Sasaran Strategis RB Nasional 2020-2024	Indikator Tujuan	Baseline 2021	Target 2024	Eksisting
1.	Terciptanya tata kelola pemerintah digital yang lincah, kolaboratif, dan akuntabel	Indeks SPBE	Baik	Baik	2,70
		Capaian Akuntabilitas Kinerja	Baik	Minimal Baik	67,29
		Capaian Akuntabilitas Keuangan	WTP	WTP dengan Tingkat tindaklanjut 80%	58,85
2.	Terciptanya Budaya Birokrasi Ber AKHLAK dengan ASN yang Profesional	Nilai Survei Employer Branding	6,90%	7,66%	71,5% (B/cukup sehat)
		Nilai Survei Indeks BerAKHLAK	60,9%	67,142%	62,4%
		Nilai Survei Penilaian Integritas	71,4%	Nilai Meningkat	81,66

		Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	74,89	Nilai Meningkat	84,46 (Baik)
--	--	--	-------	--------------------	-----------------

II.2. Capaian RB sampai saat ini:

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada tahun 2022 berada diangka 58,20 atau kategori CC dengan rincian hasil evaluasi sebagai berikut:

Tabel 2.3

No.	Komponen Penilaian	Bobot	2021	2022
A.	Komponen Pengungkit			
	I. Pemenuhan	20,00	11,29	11,73
	II. Hasil Antara Area Perubahan	10,00	5,26	6,38
	III. Reform	30,00	8,33	9,22
Total Komponen Pengungkit		60,00	24,88	27,33
B	Komponen Hasil			
1.	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	7, 62	7,71
2.	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	8,62	8,68
3.	Pemerintahan yang bersih dan Bebas KKN	10,00	8,11	8,17
4.	Kinerja Organisasi	10,00	6,04	6,31
Total Komponen Hasil		40,00	30,39	30,87
Indeks Reformasi Birokrasi		100,00	55,27	58,20

Grafik 1.1

Peningkatan RB Kabupaten Belitung Timur



Berdasarkan data dari BPS, angka kemiskinan di Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2022 adalah 6,49. Angka Investasi Daerah mengalami peningkatan dari Rp 472.466.243.047,00 pada tahun 2021 menjadi Rp. 1.373.500.761.980,00 pada tahun 2022. Hal ini dikarenakan adanya kegiatan *replanting* yang dilakukan perusahaan yang bergerak di sektor perkebunan dan di dukung kegiatan pengendalian penanaman modal kepada pelaku usaha berupa pemantauan, pembinaan dan pengawasan yang kembali mendapat dukungan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Fasilitas Penanaman Modal pada tahun 2022.

II.3 ISU STRATEGIS

Isu strategis yang merupakan masalah-masalah yang terjadi pada pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Belitung Timur. Isu strategis dapat berpotensi menimbulkan masalah lain jika tidak segera ditangani. Beberapa isu yang terkait dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Belitung Timur adalah sebagai berikut:

1) Birokrasi yang belum kolaboratif.

Keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi harus didukung oleh Dalam rangka mewujudkan birokrasi yang berorientasi hasil dan meningkatkan peran Perangkat Daerah sebagai pelaksana yang menjadi kunci keberhasilan Masih terdapat tantangan dalam perencanaan dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Belitung Timur, maka perlu dilakukan kolaborasi dan integrasi dalam rumusan tujuan, sasaran dan strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

2) Transformasi Digital yang Belum Optimal.

Dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian PANRB terhadap implementasi SPBE Kabupaten Belitung Timur masih diangka 2,70 dari skala 1-5. Hal ini menunjukkan perlu pembenahan dan peningkatan pelayanan yang berbasis elektronik.

3) Belum optimalnya program Reformasi Birokrasi.

4) Agen Perubahan belum sepenuhnya memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan budaya kerja.

5) Belum adanya kebijakan sistem pemberian kompensasi kepada pengguna layanan.

BAB III

AGENDA REFORMASI BIROKRASI

PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2021-2024

III.1 PENETAPAN TUJUAN DAN SASARAN REFORMASI BIROKRASI

Tujuan RB “Birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan Nasional dan Pelayanan Publik.”

Indikator *outcome*:

1. Indeks Reformasi Birokrasi;
2. *Corruption Perception Index* (indeks persepsi korupsi);
3. *E-Goverment Development Index*;
4. *Government effectiveness index*.

Indikator *Impact*:

1. Penurunan angka kemiskinan;
2. Peningkatan investasi Daerah;
3. Pengendalian Inflasi Daerah;
4. Penggunaan produk dalam Negeri.

Penetapan Prioritas Kegiatan Utama dan Target Reformasi Birokrasi General

Tabel.3.1

No	Kegiatan Utama	Indikator Kinerja Utama	Beseline (2022)	Target Tahunan		Unit Satuan Kerja	
				2023	2024	Koordinator	Pelaksana
1.	Penyederhanaan Birokrasi	Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi	100%	100%	100%	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)	Seluruh PD
2.	Pelaksanaan Bekerja Sistem Kerja Baru dan fleksibilitas Bekerja Pegawai ASN	Tingkat Implementasi Sistem kerja Baru dan Fleksibilitas Bekerja Pegawai	-	50%	60%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Seluruh PD
3.	Pelaksanaan Arsitektur SPBE	Indeks SPBE	2,70	2,80	2,90	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Seluruh PD
4.		Tingkat Implementasi Inisiatif Stategi Arsitektur SPBE	0	0	50%	Dinas Komunikas, Informatika, Statistik dan Persandian	Seluruh PD
5.	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang	Indeks Perencanaan pembanguna n	89,91	80 (RKP D)	90 (RKP D)	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembanga	Seluruh PD

	terintegrasi					n Daerah	
6.		Nilai SAKIP	B	BB	BB	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)	Seluruh PD
7.	Pembangunan Zona Integritas di Unit	Tingkat Keberhasilan pembangunan ZI	2	2	2	Inspektorat	Seluruh PD
8.	Penguatan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP	2	2	3	Inspektorat	Seluruh PD
9.	Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (SP4N)	100%	100%	100%	1. Inspektorat Daerah 2. Setda (Bagian Organisasi) 3. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Seluruh PD
10.	Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Survei Penilaian Integritas (SPI)	81,66	81,66	81,66	Inspektorat Daerah	Seluruh PD
11.	Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	Indeks Kualitas Kebijakan	-	60	60	Sekretariat Daerah (Bagian Hukum)	Seluruh PD
12.	Pelaksanaan Pembentukan Peraturan	Indeks Reformasi Hukum	90,85	90,85	91	Sekretariat Daerah (Bagian Hukum)	Seluruh PD
13.	Pelaksanaan Arsip Digital	Tingkat Digitalisasi Arsip	50	70	100	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Seluruh PD
14.	Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	-	2	2	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Seluruh PD
15.	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks Tata Kelola Pengadaan	67,2	82,2	85,4	Sekretariat Daerah (Bagian PBJ)	Seluruh PD
16.	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Seluruh PD
17.		Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	95%	96%	97%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Seluruh PD
18.	Penataan Jabatan Fungsional	Tingkat Penerapan Kebijakan	100%	100%	100%	Badan Kepegawaian dan Sumber	Seluruh PD

		Transformasi Jabatan Fungsional				Daya Manusia	
19.	Penguatan Manajemen Talenta ASN	Tingkat Implementasi Manajemen Talenta	0	50	60	Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia	Seluruh PD
20.	Penguatan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit	-	122,0 0	143,0 0	Badan Kepegawaian dan Pengembang an Sumber Daya Manusia	Seluruh PD
21.	Pelaksanaan Core Values ASN	Indeks BerAKHLAK	62,4%	65%	75%	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)	Seluruh PD
22.		Employeeer Branding	71,5%	71,5 %	71,5 %	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)	Seluruh PD
23.	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	84,46 (Baik)	85 (Baik)	85 (Baik)	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)	Seluruh PD
24.		Indeks Pelayanan Publik	3,36	3,50	3,50	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)	Seluruh PD
25.	Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital	Tingkat Implementasi Kebijakan Transformasi Digital MPP	-	-	-	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Seluruh PD

Penetapan Tema dan Target Reformasi Birokrasi Tematik:
Tabel 3.2

No	Tema	Sasaran Tematik	Indikator Sasaran Tematik	Base Line	Target Tahunan		Unit Satuan Kerja	
				2022	2023	2024	Koordi nator	Pelak sana
1	Penanggula ngan kemiskinan	Menurun nya Tingkat Kemiskin an	Indeks Kedalaman Kemiskinan	0,90	0,588	0,534	Kepala Dinas Sosial, Pemberdaya an Perempuan dan Perlindunga n Anak	Seluruh PD
			Indeks Keparahan Kemiskinan	0,19	0,15	0,14	Kepala Dinas Sosial, Pemberdaya an	Seluruh PD

							Perempuan dan perlindungan Anak	
		Terwujudnya Pemerataan Perlindungan dan jaminan sosial	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	98,45	96,80	97,00	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak	Seluruh PD
			Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	78,43	84,90	84,95	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak	Seluruh PD
			Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	100,00	100,00	100,00	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak	Seluruh PD
2	Peningkatan Investasi	Meningkatnya investasi Daerah	Nilai Investasi tahunan berskala nasional (PMA/PMDN)	1.373,500	378,771	390,503	Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Seluruh PD
		Meningkatnya Daya Saing Daerah	Indeks Daya Saing Daerah	2,53	1,62	1,63	Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Seluruh PD
3	Digitalisasi Administrasi Pemerintah	Pencegahan Stunting	Penurunan Prevalensi Stunting				Kepala Dinas Kesehatan	Seluruh PD

	an-Stanting							
			Kabupaten Sehat	Padapa	Wiwerda	Wiwerda	Kepala Dinas Kesehatan	Seluruh PD
4	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN)	Meningkatnya Penggunaan Produk Dalam Negeri	Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri				Sekretaris Daerah: Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Seluruh PD
5	pengendalian Inflasi	Meningkatnya perekonomian lokal	Laju Pertumbuhan Ekonomi	3,80	3,50	80	Sekretaris Daerah: Kepala Bagian Ekonomi, Pembangunan dan SDA	Seluruh PD
			PDRB Per kapita	75,00	65,20	66,57	Sekretaris Daerah: Kepala Bagian Ekonomi, Pembangunan dan SDA	Seluruh PD
		Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	Laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	1,51	3,90	4,10	Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu,	Seluruh PD
			Laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	1,51	3,90	4,10	1. Kepala Dinas Perikanan; 2. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan	Seluruh PD
			Laju pertumbuhan PDRB sektor penyediaan akomodasi makanan dan minuman	13,08	3,60	3,80	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.	Seluruh PD

		Meningkatnya Daya saing Daerah	Indeks Daya Saing Daerah	2,53	1,62	1,63	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan	Seluruh PD
--	--	--------------------------------	--------------------------	------	------	------	--------------------------------------	------------

BAB IV

MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

IV.1 Pelaksanaan Reformasi Birokrasi:

Dalam rangka percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Pemerintah Kabupaten Belitung Timur telah membentuk Tim untuk mengawal pelaksanaan yang berfokus pada pencapaian Sasaran/tujuan/indikator/program Reformasi Birokrasi, dengan susunan Tim sebagai berikut:

SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI

KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2023-2024

Tim Reformasi Birokrasi Kabupaten Belitung Timur:

Tabel 4.1

Tim Reformasi Birokrasi Kabupaten Belitung Timur		
No	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1.	Bupati Belitung Timur	Pengarah I
2.	Wakil Bupati Belitung Timur	Pengarah II
3.	Sekretaris Daerah	Ketua Tim Reformasi Birokrasi
4.	Asisten Administrasi Umum	Wakil Ketua Tim Reformasi Birokrasi
5.	Kepala Bagian Organisasi	Sekretaris Tim Reformasi Birokrasi
Koordinator dan pelaksana Reformasi Birokrasi General:		

Koordinator dan pelaksana Reformasi Birokrasi General:

Tabel 4.2

No.	Kegiatan Utama	Indikator Kinerja Utama	Unit Satuan Kerja	
			Koordinator	Pelaksana/Anggota
1.	Penyederhanaan Birokrasi	Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi	Sekretaris Daerah Kepala Bagian Organisasi	Seluruh PD
2.	Pelaksanaan Bekerja Sistem Kerja Baru dan fleksibilitas	Tingkat Implementasi Sistem kerja Baru dan	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Seluruh PD

	Bekerja Pegawai ASN	Fleksibilitas Bekerja Pegawai		
3.	Pelaksanaan Arsitektur SPBE	Indeks SPBE	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Seluruh PD
		Tingkat Implementasi Inisiatif Strategi Arsitektur SPBE	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Seluruh PD
4.	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	Indeks Perencanaan pembangunan	Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Seluruh PD
		Nilai SAKIP	Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Seluruh PD
5.	Pembangunan Zona Integritas di Unit	Tingkat Keberhasilan pembangunan ZI	Inspektur Daerah	Seluruh PD
6.	Penguatan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP	Inspektur Daerah	Seluruh PD
7.	Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (SP4N)	1. Inspektur Daerah 2. Sekretaris Daerah: Kepala Bagian Organisasi 3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Seluruh PD
8.	Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Survei Penilaian Integritas (SPI)	Inspektur Daerah	Seluruh PD
9.	Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	Indeks Kualitas Kebijakan	Sekretaris Daerah: Kepala Bagian Hukum	Seluruh PD
10.	Pelaksanaan Pembentukan Peraturan	Indeks Reformasi Hukum	Sekretaris Daerah: Kepala Bagian Hukum	Seluruh PD

11.	Pelaksanaan Arsip Digital	Tingkat Digitalisasi Arsip	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Seluruh PD
12.	Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Seluruh PD
13.	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Sekretaris Daerah: Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Seluruh PD
14.	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Opini BPK	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Seluruh PD
		Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	Inspektorat Daerah	Seluruh PD
15.	Penataan Jabatan Fungsional	Tingkat Penerapan Kebijakan Transformasi Jabatan Fungsional	Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia	Seluruh PD
16.	Penguatan Manajemen Talenta ASN	Tingkat Implementasi Manajemen Talenta	Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia	Seluruh PD
17.	Penguatan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit	Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia	Seluruh PD
18.	Pelaksanaan Core Values ASN	Indeks BerAKHLAK	Sekretaris Daerah: Kepala Bagian Organisasi	Seluruh PD
		Employee Branding	Sekretaris Daerah: Kepala Bagian Organisasi	Seluruh PD
19.	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Sekretaris Daerah: Kepala Bagian Organisasi	Seluruh PD
		Indeks Pelayanan Publik	Sekretaris Daerah: Kepala Bagian Organisasi	Seluruh PD
20.	Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital	Tingkat Implementasi Kebijakan Transformasi Digital MPP	Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Seluruh PD

Koordinator dan Pelaksana Reformasi Birokrasi Tematik:

Tabel 4.3

No	Tema	Sasaran Tematik	Indikator Sasaran Tematik	Unit Satuan Kerja	
				Koordinator	Pelaksana
1	Penanggula ngan kemiskinan	Menurunny a Tingkat Kemiskinan	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Seluruh PD
			Indeks Keparahan Kemiskinan	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Seluruh PD
		Terwujudny a Pemerataan Perlindungan dan jaminan sosial	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Seluruh PD
			Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagaker jaan	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Seluruh PD
			Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Seluruh PD
2	Peningkatan Investasi	Meningkatn ya investasi Daerah	Nilai Investasi tahunan berskala nasional (PMA/PMD N)	Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Seluruh PD

		Meningkatn ya Daya Saing Daerah	Indeks Daya Saing Daerah	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan ,Penelitian dan Pengembanga n Daerah	Seluruh PD
3	Digitalisasi Administras i Pemerintah an- Stunting	Pencegahan Stunting	Penurunan Prevalensi Stunting	Kepala Dinas Kesehatan	Seluruh PD
			Kabupaten Sehat	Kepala Dinas Kesehatan	Seluruh PD
4	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN)	Meningkatn ya Penggunaan Produk Dalam Negeri	Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri	Sekretaris Daerah: Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Seluruh PD
5	dan pengendalia n Inflasi	Meningkatn ya perekonomi an lokal	Laju Pertumbuha n Ekonomi	Sekretaris Daerah: Kepala Bagian Ekonomi, Pembangunan dan SDA	Seluruh PD
			PDRB Per kapita	Sekretaris Daerah: Kepala Bagian Ekonomi, Pembangunan dan SDA	Seluruh PD
		Meningkatn ya pertumbuha n ekonomi sektor unggulan	Laju pertumbuha n PDRB sektor industri pengolahan	Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu.	Seluruh PD
			Laju pertumbuha n PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	1. Kepala Dinas Perikanan; 2. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan	Seluruh PD
			Laju pertumbuha n PDRB sektor penyediaan akomodasi makanan dan minuman	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Seluruh PD

		Meningkatn ya Daya saing Daerah	Indeks Daya Saing Daerah	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan	Seluruh PD
--	--	--	--------------------------------	--	------------

Tim Reformasi Birokrasi Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023-2024, melaksanakan tugas:

- a. Pengarah:
 - 1. mengarahkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
 - 2. menetapkan Rencana Kegiatan Reformasi Birokrasi; dan
 - 3. bertanggungjawab atas seluruh pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi.
- b. Ketua:
 - 1. memberikan arahan terkait pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
 - 2. membuat rumusan untuk mengembangkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi; dan
 - 3. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Penanggungjawab Tim Reformasi Birokrasi.
- c. Wakil Ketua:
 - 1. mengoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi; dan
 - 2. mengoordinasikan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim Reformasi Birokrasi.
- d. Sekretaris:
 - 1. membantu tugas-tugas Ketua Tim dalam mengkoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
 - 2. membantu mempersiapkan materi/bahan arahan guna kelancaran dan optimalnya pelaksanaan tugas Ketua tim;
 - 3. membantu Ketua Tim dalam membuat rumusan untuk mengembangkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi; dan
 - 4. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Ketua Tim.
- e. Koordinator:
 - 1. melakukan pengawasan dan memberi pengarahan teknis untuk pelaksanaan kerja kepada anggota Tim;
 - 2. memberi bimbingan teknis dan saran kepada anggotanya supaya pelaksanaan pekerjaan berjalan lancar;
 - 3. melakukan koordinasi hasil perkerjaan secara rutin;
 - 4. mengetahui target pekerjaan yang dikerjakan; dan
 - 5. bertanggung jawab atas penyelesaian pekerjaan yang dilaksanakan oleh anggotanya.

f. Pelaksana/Anggota:

1. menyiapkan dan mengumpulkan bahan/data untuk perencanaan dan pelaksanaan reformasi birokrasi;
2. menganalisis bahan/data perencanaan dan pelaksanaan reformasi birokrasi; dan
3. mengkoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi.

IV.2 Mekanisme Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi:

A. Pelaksanaan monitoring dilakukan pada kegiatan dalam Rencana Aksi Pemerintah Daerah yang melekat pada Perangkat Daerah tertentu, monitoring tersebut dilakukan melalui media:

1. Pertemuan rutin yang dipimpin langsung oleh Kepala Perangkat Daerah setidaknya setiap satu bulan sekali;
2. Survey rutin, khusus terkait dengan bidang tugas atau pelayanan yang dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah, setidaknya survey dilakukan setahun sekali;
3. Pengelolaan pengaduan;
4. Pengukuran target-target yang telah ditetapkan; dan
5. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi.

Pelaksanaan monitoring dilakukan terhadap seluruh program dan kegiatan sebagaimana direncanakan dalam rencana aksi, dilakukan melalui media:

1. Pertemuan rutin Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dilakukan per triwulan untuk:
 - a. membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian yang perlu dilakukan untuk merespon permasalahan atau perkembangan lingkungan strategis;
 - b. Pengukuran target-target kegiatan Reformasi Birokrasi sebagaimana diuraikan dalam *Road Map* dengan realisasinya; dan
 - c. Pertemuan dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Daerah.
2. Survey rutin melalui internet untuk mengetahui indeks kualitas pelayanan yang dipersepsikan oleh masyarakat;
3. Pengelolaan pengaduan; dan
4. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi oleh masing-masing kelompok kerja pada rapat pleno.

Mekanisme monitoring dilakukan sebagai berikut:

Pada lingkup PD, mekanisme dilakukan sebagai berikut:

1. Setiap unit kerja/koordinator yang ditunjuk untuk mengkordinasikan kegiatan dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi di masing-masing Perangkat Daerah, wajib melakukan monitoring secara berkala terhadap kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
2. Hasil monitoring dilaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah secara rutin, paling tidak 1 (satu) bulan sekali sekali. Jika terdapat hal penting yang perlu segera ditindaklanjuti, maka dapat langsung dilaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah;
3. Kepala Perangkat Daerah bersama tim Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah menyusun laporan hasil monitoring yang memuat pengukuran atas target atau kegiatan yang tertuang pada rencana kerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi; dan
4. Seluruh hasil monitoring disampaikan kepada kelompok kerja monitoring dan evaluasi yang koordinasikan oleh Inspektorat Daerah.

Pada lingkup Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, mekanisme dilakukan sebagai berikut:

1. Setiap kelompok kerja wajib melakukan monitoring secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan dalam rangka Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Belitung Timur yang menjadi tanggungjawabnya;
2. Hasil monitoring dibahas dalam tingkat kelompok kerja dan disampaikan kepada Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Daerah;
3. Hasil monitoring dibahas dalam pertemuan rutin untuk diputuskan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan;
4. Kelompok kerja melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai tindak lanjut; dan
5. Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi yang dikoordinsikan oleh Inspektorat Daerah memantau pelaksanaan tindak lanjut.

B. Evaluasi:

Evaluasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada tingkat Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dilakukan setiap 3 (tiga) bulan pada setiap tahunnya (triwulan). Evaluasi dilakukan untuk menilai kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara keseluruhan termasuk tindak lanjut hasil monitoring yang dilakukan pada saat pelaksanaan kegiatan. Evaluasi dilakukan melalui beberapa tahapan

mulai dari unit kerja di PD hingga tingkat Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, sebagai berikut:

- a. Evaluasi semesteran atau tahunan di tingkat Pemerintah Kabupaten Belitung Timur yang dipimpin oleh Ketua Pelaksana Tim Reformasi Birokrasi Kabupaten Belitung Timur untuk membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian kegiatan yang perlu dilakukan pada enam bulan atau satu tahun ke depan, sehingga tidak terjadi permasalahan yang sama atau dalam rangka merespon perkembangan lingkungan strategis. Evaluasi dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh prioritas yang telah ditetapkan pada *Road Map* Reformasi Birokrasi tingkat Kabupaten Belitung Timur; dan
- b. Evaluasi Triwulan di tingkat PD yang dipimpin oleh Kepala PD untuk membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian kegiatan yang perlu dilakukan pada 6 (enam) bulan atau satu tahun ke depan, sehingga tidak terjadi permasalahan yang sama atau dalam rangka merespon perkembangan lingkungan strategis. Evaluasi dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh prioritas yang telah ditetapkan.

Berbagai informasi yang digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan dapat diperoleh dari:

- a. Hasil-hasil monitoring;
- b. Survei kepuasan masyarakat dan persepsi anti korupsi;
- c. Pengukuran target-target kegiatan Reformasi Birokrasi sebagaimana diuraikan dalam *Road Map* dengan realisasinya; dan
- d. Pertemuan dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Daerah.

Hasil evaluasi diharapkan dapat secara terus menerus memberikan masukan terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di tahun-tahun berikutnya. Disamping itu, hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi disetiap instansi menjadi dasar dalam pemberlakuan insentif bagi instansi terkait. Kebijakan terkait ini dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PENUTUP

Reformasi Birokrasi di Kabupaten Belitung Timur dilakukan sebagai upaya dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang dilaksanakan secara cepat, tepat dan profesional serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Pemerintah Kabupaten Belitung Timur melakukan percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang selaras dengan rencana strategis pembangunan dan berupaya mewujudkan meningkatkan pelayanan publik yang bersih efektif dan berdaya saing.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan adanya tuntutan masyarakat yang semakin tinggi, perlu dilaksanakan Reformasi Birokrasi yang mencerminkan perilaku adaptif yaitu cepat menyesuaikan diri dalam menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas serta bertindak proaktif. Perubahan Road Map ini diharapkan dapat membantu keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Belitung Timur, hal ini tidak lepas dari adanya komitmen yang kuat dari seluruh Pimpinan Perangkat Daerah dan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BURHANUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

AMRULLAH, S.H.
NIP.19710602 200604 1 005



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 37 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 43 TAHUN 2021 TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2021-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengimplementasikan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2021-2024, perlu dilakukan perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 43 Tahun 2021 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 43 Tahun 2021 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 43 TAHUN 2021 TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2021-2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 43 Tahun 2021 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2024 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 Nomor 43) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Belitung Timur.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
6. Tim Pengarah adalah Tim Pengarah pada Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
7. Tim Pelaksana adalah Tim Pelaksana pada Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.

8. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Kemen PAN-RB adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.
9. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
10. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan Informatika, bidang statistik dan bidang persandian Kabupaten Belitung Timur.
11. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal Kabupaten Belitung Timur
12. Dinas Kesehatan adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan Kabupaten Belitung Timur.
13. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah Badan yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan serta fungsi penunjang penelitian dan pengembangan.
14. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah adalah badan yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan.
15. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah badan yang melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.
16. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
17. Bagian Organisasi adalah Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
18. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Aparat Pengawas Intern Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Timur yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5(lima) tahun kedepan.
20. Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat RB adalah proses menata ulang birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berpikir diluar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma dan dengan upaya luar biasa.
21. *Grand Design* Reformasi Birokrasi adalah rancangan induk yang berisi arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu 2010-2025.
22. Road Map Reformasi Birokrasi adalah dokumen dalam bentuk operasionalisasi *Grand Design* Reformasi Birokrasi (GDRB) yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci pelaksanaan reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama 5 (lima) tahun dengan sasaran pertahun yang jelas.

23. Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Belitung Timur yang selanjutnya disebut Road Map Reformasi Birokrasi adalah rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2024.
24. Reformasi Birokrasi General adalah upaya yang berfokus pada perbaikan sistem dan tata kelola internal pada instansi pemerintah.
25. Reformasi Birokrasi Tematik adalah upaya dan sarana untuk mengurai dan menjawab atau mengatasi akar permasalahan tata kelola pemerintahan (*debottlenecking*) yang memang dirasakan secara langsung oleh masyarakat.
26. Rencana Aksi Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Rencana Aksi RB General dan Rencana Aksi RB Tematik Pemerintah Kabupaten Belitung Timur adalah langkah-langkah rinci yang diambil untuk mencapai sasaran tujuan jangka panjang atau jangka pendek pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Belitung Timur tahun 2023-2026.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	:	PENDAHULUAN.
BAB II	:	GAMBARAN BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR.
BAB III	:	AGENDA REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2021-2024.
BAB IV	:	MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI.
BAB V	:	PENUTUP.
- (3) Pelaksanaan *Road Map* Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijabarkan dalam Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2024.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 30 Oktober 2023

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BURHANUDIN

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 30 Oktober 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

SAYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



AMRULLAH, S.H.
NIP.19710602 200604 1 005

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 37 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 43 TAHUN 2021 TENTANG ROAD MAP REFORMASI
BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN
2021-2024.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai *good governance* dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur.

Dengan adanya perubahan regulasi terkait dengan arahan Presiden untuk mewujudkan birokrasi yang mampu menciptakan hasil, birokrasi yang mampu menjamin agar manfaat kebijakan itu dirasakan oleh masyarakat (*making delivered*), serta birokrasi yang lincah dan cepat (*agile bureaucracy*) maka pada Tahun 2023 ini dilakukan penajaman terhadap Road Map Reformasi Birokrasi 2021-2024 dengan tujuan “Birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik.”

Perubahan Road Map ini diharapkan dapat menjawab isu utama RB yang berkembang yang terkait dengan dampak dan kontribusi RB pada pembangunan Nasional, peningkatan kualitas pelayanan publik, penciptaan pemerintah yang bersih dan bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme serta peningkatan daya saing Indonesia dibanding dengan negara lainnya. Penajaman terhadap fokus pelaksanaan RB diharapkan dapat menyelesaikan isu hulu dan isu hilir yaitu sasaran RB General bertujuan untuk menyelesaikan masalah tata kelola pemerintahan yang terjadi di internal Birokrasi dan sasaran RB Tematik dengan yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang muncul di masyarakat dan terkait dengan agenda prioritas Pembangunan Nasional. Penetapan target dan rencana pelaksanaan kegiatan RB diselaraskan dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Belitung Timur dan Rencana Strategis PD, hal ini bertujuan untuk menjamin terlaksananya tujuan dan sasaran RB di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.

BAB 1

PENDAHULUAN

Terjadinya penyesuaian terhadap perubahan kebijakan nasional terkait dengan pelaksanaan RB merupakan hal yang mendorong pemerintah untuk melakukan penyesuaian pelaksanaan RB dengan membenahi transformasi digital dalam penyelenggaraan tatakelola pemerintahan yang baik. Selain itu, RB yang ada saat ini belum berdampak nyata dan fokus pada manfaat yang secara langsung dirasakan oleh masyarakat dan perbandingan capaian terkini dengan kondisi akhir yang diharapkan pada akhir tahun 2025 terlihat gap yang cukup jauh.

Beberapa upaya RB masih berfokus pada proses dan belum sepenuhnya berfokus pada manfaat yang secara langsung dirasakan masyarakat.

Secara khusus, aspek utama yang perlu ditajamkan dari *Road Map* RB 2021–2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Substansi tujuan, sasaran, dan indikator keberhasilan RB dalam *Road Map* RB Kabupaten perlu dilakukan perubahan untuk menjawab isu strategis pembangunan di daerah Kabupaten Belitung Timur yang terkait dengan, daya saing daerah, dan isu-isu strategis lainnya yang perlu dijawab dengan akselerasi RB.
- 2) Sasaran program pembangunan bersifat lintas sektor (*cross cutting issue*), sehingga memerlukan strategi RB dalam percepatan pencapaian sasaran lintas sektor dan instansi. Kebijakan-kebijakan RB diharapkan menjadi kebijakan kunci yang paling berkontribusi terhadap sasaran strategis dan tujuan RB.
- 3) Pengelolaan RB yang fokus untuk percepatan pencapaian tujuan dan sasaran strategis RB dengan penyelesaian terhadap akar masalah melalui perbaikan sistem dan manajemen internal, serta isu prioritas antara lain kemiskinan dan investasi.
- 4) Kolaborasi pelaksanaan RB yang cenderung silo (*fragmented*) khususnya antara PD pengampu indeks dapat berdampak pada pengukuran RB yang tidak efektif, sehingga dibutuhkan indikator RB yang paling relevan dan signifikan untuk mengukur keberhasilan RB, sehingga diperlukan penyederhanaan, sinergi dan integrasi antar indikator kinerja yang sejenis.

BAB II GAMBARAN BIROKRASI KABUPATEN BELITUNG TIMUR

II.1 Isu Strategis RB Tahun 2021-2024

Isu strategis yang menjadi permasalahan, tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan RB datang dari hulu dan hilir, hal ini harus diantisipasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan sebagaimana yang dicita-citakan pada tahun 2024.

II.1.1. Isu Strategis di Tingkat Hulu

1) Birokrasi yang Belum Kolaboratif

Masih perlu peningkatan efektivitas peran aktor dan sektor dalam kolaborasi dan integrasi untuk mencapai tujuan, sasaran dan strategi pelaksanaan RB.

2) Transformasi Digital yang Belum Optimal

Implementasi SPBE menurut hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian PANRB, di Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2022 masih di angka 2,70 dari skala 0-5. Untuk itu masih diperlukan penguatan dan percepatan implementasi SPBE secara berkelanjutan dalam rangka perbaikan perencanaan dan integrasi sistem pelayanan pemerintahan.

3) Penyederhanaan Struktur kerja baru yang belum tuntas

Belum sepenuhnya melaksanakan Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi.

4) Integritas penyelenggaraan Pemerintah yang masih menghadapi kendala

Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Belitung Timur perlu meningkatkan kapabilitas APIP yang masih di level 2, masih perlu dilakukan monitoring terhadap implementasi kebijakan benturan kepentingan, *Whistleblowing System*, pengaduan masyarakat, dan pengendalian gratifikasi.

5) Budaya Birokrasi: BerAKHLAK yang belum terimplementasi dengan baik

Belum seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur memahami Budaya Kerja BerAKHLAK, sehingga perlu diinternalisasikan kepada ASN agar menerapkan berperilaku ASN Ber AKHLAK dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

II.1.2. Isu Strategis di tingkat Hilir:

Isu strategis yang muncul di masyarakat terkait dengan agenda program pembangunan Daerah Kabupaten Belitung Timur. Isu hilir akan terjadi jika isu hulu tidak bisa diselesaikan. Adapun isu hilir yang berkaitan dengan pelaksanaan RB:

- 1) Hasil pelaksanaan program pengentasan kemiskinan belum sebanding dengan sumber daya yang dikeluarkan.
Total anggaran pengentasan kemiskinan pada tahun 2021 Rp. 301.904. 025. 295,00 Dengan anggaran diatas hanya mampu menurunkan 0,7% dari 7,20% (data 2021) menjadi 6,49% (data 2022).
Dalam rangka percepatan pencapaian Sasaran Pemerintah Kabupaten Belitung Timur terus menjalin kerjasama/berkolaborasi dengan pihak ketiga diluar instansi guna mencapai target output dan lokus kegiatan diantaranya program CSR (PT. Timah, Perusahaan Sawit dan PerBANKAN).
- 2) Tantangan resesi global dan pentingnya investasi.
- 3) Tantangan perubahan global dan tuntutan terhadap pelayanan publik.
- 4) Dampak inflasi yang tidak terkendali.

Kondisi eksisting sesuai dengan Road Map RB 2021-2024 indikator-indikator RB:

Target Kinerja Tujuan RB
Tabel 2.1

NO	TUJUAN RB NASIONAL 2020-2024	INDIKATOR RB	ROAD MAP RB NASIONAL 2024	TARGET RPJMD 2024	KONDISI /EKSISTING TH 2022
1.	Terwujudnya Birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan public	Capaian Indeks Reformasi Birokrasi	Baik	65 (Nilai)	58,20
		Capaian Indikator Kinerja Pembangunan (Angka Kemiskinan, Pertumbuhan Investasi)	Angka Kemiskinan: 9,71 (Sept 2021) Pertumbuhan	5,88 (Persen) 402,814	6,49 (Persen)

			Investasi= 9,0% (2021/2020)	(Juta Rupiah)	- 472.466 (Juta Rupiah) (2021)
			Penanaman Modal 2021: 901,0		-1.373.500 (2022)
			Realisasi Penanaman Modal 2020: 826,3		
		Capaian tiga Indikator Daya Saing Global (CPI, EGDI)	CPI: Skor 38 Peringkat 96 dari 180 negara (2021) EGDI: Peringkat ke 88	1,64 (Skor 1-5)	Indeks Daya saing Daerah 2,53 (2022)

Target Kinerja Sasaran Strategis RB
Tabel 2.2

No	Sasaran Strategis RB Nasional 2020-2024	Indikator Tujuan	Baseline 2021	Target 2024	Eksisting
1.	Terciptanya tata kelola pemerintah digital yang lincah, kolaboratif, dan akuntabel	Indeks SPBE	Baik	Baik	2,70
		Capaian Akuntabilitas Kinerja	Baik	Minimal Baik	67,29
		Capaian Akuntabilitas Keuangan	WTP	WTP dengan Tingkat tindaklanjut 80%	58,85
2.	Terciptanya Budaya Birokrasi Ber AKHLAK dengan ASN yang Profesional	Nilai Survei Employer Branding	6,90%	7,66%	71,5% (B/cukup sehat)
		Nilai Survei Indeks BerAKHLAK	60,9%	67,142%	62,4%
		Nilai Survei Penilaian Integritas	71,4%	Nilai Meningkat	81,66

		Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	74,89	Nilai Meningkat	84,46 (Baik)
--	--	--	-------	--------------------	-----------------

II.2. Capaian RB sampai saat ini:

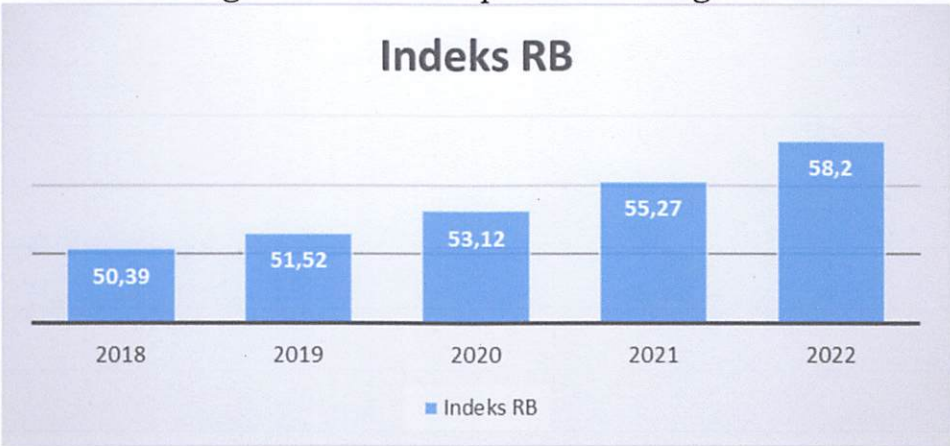
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada tahun 2022 berada diangka 58,20 atau kategori CC dengan rincian hasil evaluasi sebagai berikut:

Tabel 2.3

No.	Komponen Penilaian	Bobot	2021	2022
A.	Komponen Pengungkit			
	I. Pemenuhan	20,00	11,29	11,73
	II. Hasil Antara Area Perubahan	10,00	5,26	6,38
	III. Reform	30,00	8,33	9,22
Total Komponen Pengungkit		60,00	24,88	27,33
B	Komponen Hasil			
1.	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	7, 62	7,71
2.	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	8,62	8,68
3.	Pemerintahan yang bersih dan Bebas KKN	10,00	8,11	8,17
4.	Kinerja Organisasi	10,00	6,04	6,31
Total Komponen Hasil		40,00	30,39	30,87
Indeks Reformasi Birokrasi		100,00	55,27	58,20

Grafik 1.1

Peningkatan RB Kabupaten Belitung Timur



Berdasarkan data dari BPS, angka kemiskinan di Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2022 adalah 6,49. Angka Investasi Daerah mengalami peningkatan dari Rp 472.466.243.047,00 pada tahun 2021 menjadi Rp. 1.373.500.761.980,00 pada tahun 2022. Hal ini dikarenakan adanya kegiatan *replanting* yang dilakukan perusahaan yang bergerak di sektor perkebunan dan di dukung kegiatan pengendalian penanaman modal kepada pelaku usaha berupa pemantauan, pembinaan dan pengawasan yang kembali mendapat dukungan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Fasilitasi Penanaman Modal pada tahun 2022.

II.3 ISU STRATEGIS

Isu strategis yang merupakan masalah-masalah yang terjadi pada pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Belitung Timur. Isu strategis dapat berpotensi menimbulkan masalah lain jika tidak segera ditangani. Beberapa isu yang terkait dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Belitung Timur adalah sebagai berikut:

1) Birokrasi yang belum kolaboratif.

Keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi harus didukung oleh Dalam rangka mewujudkan birokrasi yang berorientasi hasil dan meningkatkan peran Perangkat Daerah sebagai pelaksana yang menjadi kunci keberhasilan Masih terdapat tantangan dalam perencanaan dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Belitung Timur, maka perlu dilakukan kolaborasi dan integrasi dalam rumusan tujuan, sasaran dan strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

2) Transformasi Digital yang Belum Optimal.

Dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian PANRB terhadap implementasi SPBE Kabupaten Belitung Timur masih diangka 2,70 dari skala 1-5. Hal ini menunjukkan perlu pembenahan dan peningkatan pelayanan yang berbasis elektronik.

3) Belum optimalnya program Reformasi Birokrasi.

4) Agen Perubahan belum sepenuhnya memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan budaya kerja.

5) Belum adanya kebijakan sistem pemberian kompensasi kepada pengguna layanan.

BAB III

AGENDA REFORMASI BIROKRASI

PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2021-2024

III.1 PENETAPAN TUJUAN DAN SASARAN REFORMASI BIROKRASI

Tujuan RB “Birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan Nasional dan Pelayanan Publik.”

Indikator *outcome*:

1. Indeks Reformasi Birokrasi;
2. *Corruption Perception Index* (indeks persepsi korupsi);
3. *E-Goverment Development Index*;
4. *Government effectiveness index*.

Indikator *Impact*:

1. Penurunan angka kemiskinan;
2. Peningkatan investasi Daerah;
3. Pengendalian Inflasi Daerah;
4. Penggunaan produk dalam Negeri.

Penetapan Prioritas Kegiatan Utama dan Target Reformasi Birokrasi General

Tabel.3.1

No	Kegiatan Utama	Indikator Kinerja Utama	Beseline (2022)	Target Tahunan		Unit Satuan Kerja	
				2023	2024	Koordinator	Pelaksana
1.	Penyederhanaan Birokrasi	Tingkat Implementasi Penyederhaan Birokrasi	100%	100%	100%	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)	Seluruh PD
2.	Pelaksanaan Bekerja Sistem Kerja Baru dan fleksibilitas Bekerja Pegawai ASN	Tingkat Implementasi Sistem kerja Baru dan Fleksibilitas Bekerja Pegawai	-	50%	60%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Seluruh PD
3.	Pelaksanaan Arsitektur SPBE	Indeks SPBE	2,70	2,80	2,90	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Seluruh PD
4.		Tingkat Implementasi Inisiatif Stategi Arsitektur SPBE	0	0	50%	Dinas Komunikas, Informatika, Statistik dan Persandian	Seluruh PD
5.	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang	Indeks Perencanaan pembanguna n	89,91	80 (RKP D)	90 (RKP D)	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitain dan Pengembanga	Seluruh PD

	terintegrasi					n Daerah	
6.		Nilai SAKIP	B	BB	BB	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)	Seluruh PD
7.	Pembangunan Zona Integritas di Unit	Tingkat Keberhasilan pembangunan ZI	2	2	2	Inspektorat	Seluruh PD
8.	Penguatan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP	2	2	3	Inspektorat	Seluruh PD
9.	Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (SP4N)	100%	100%	100%	1. Inspektorat Daerah 2. Setda (Bagian Organisasi) 3. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Seluruh PD
10.	Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Survei Penilaian Integritas (SPI)	81,66	81,66	81,66	Inspektorat Daerah	Seluruh PD
11.	Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	Indeks Kualitas Kebijakan	-	60	60	Sekretariat Daerah (Bagian Hukum)	Seluruh PD
12.	Pelaksanaan Pembentukan Peraturan	Indeks Reformasi Hukum	90,85	90,85	91	Sekretariat Daerah (Bagian Hukum)	Seluruh PD
13.	Pelaksanaan Arsip Digital	Tingkat Digitalisasi Arsip	50	70	100	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Seluruh PD
14.	Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	-	2	2	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Seluruh PD
15.	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks Tata Kelola Pengadaan	67,2	82,2	85,4	Sekretariat Daerah (Bagian PBJ)	Seluruh PD
16.	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Seluruh PD
17.		Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	95%	96%	97%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Seluruh PD
18.	Penataan Jabatan Fungsional	Tingkat Penerapan Kebijakan	100%	100%	100%	Badan Kepegawaian dan Sumber	Seluruh PD

		Transformasi Jabatan Fungsional				Daya Manusia	
19.	Penguatan Manajemen Talenta ASN	Tingkat Implementasi Manajemen Talenta	0	50	60	Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia	Seluruh PD
20.	Penguatan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit	-	122,0 0	143,0 0	Badan Kepegawaian dan Pengembang n Sumber Daya Manusia	Seluruh PD
21.	Pelaksanaan Core Values ASN	Indeks BerAKHLAK	62,4%	65%	75%	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)	Seluruh PD
22.		Employeeer Branding	71,5%	71,5 %	71,5 %	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)	Seluruh PD
23.	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	84,46 (Baik)	85 (Baik)	85 (Baik)	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)	Seluruh PD
24.		Indeks Pelayanan Publik	3,36	3,50	3,50	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)	Seluruh PD
25.	Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital	Tingkat Implementasi Kebijakan Transformasi Digital MPP	-	-	-	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Seluruh PD

Penetapan Tema dan Target Reformasi Birokrasi Tematik:
Tabel 3.2

No	Tema	Sasaran Tematik	Indikator Sasaran Tematik	Base Line	Target Tahunan		Unit Satuan Kerja	
				2022	2023	2024	Koordi nator	Pelak sana
1	Penanggula ngan kemiskinan	Menurun nya Tingkat Kemiskin an	Indeks Kedalaman Kemiskinan	0,90	0,588	0,534	Kepala Dinas Sosial, Pemberdaya an Perempuan dan Perlindunga n Anak	Seluruh PD
			Indeks Keparahan Kemiskinan	0,19	0,15	0,14	Kepala Dinas Sosial, Pemberdaya an	Seluruh PD

							Perempuan dan perlindungan Anak	
		Terwujudnya Pemerataan Perlindungan dan jaminan sosial	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	98,45	96,80	97,00	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak	Seluruh PD
			Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	78,43	84,90	84,95	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak	Seluruh PD
			Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	100,00	100,00	100,00	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak	Seluruh PD
2	Peningkatan Investasi	Meningkatnya investasi Daerah	Nilai Investasi tahunan berskala nasional (PMA/PMD N)	1.373,500	378,771	390,503	Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Seluruh PD
		Meningkatnya Daya Saing Daerah	Indeks Daya Saing Daerah	2,53	1,62	1,63	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Seluruh PD
3	Digitalisasi Administrasi Pemerintah	Pencegahan Stunting	Penurunan Prevalensi Stunting				Kepala Dinas Kesehatan	Seluruh PD

	an- Stanting							
			Kabupaten Sehat	Padapa	Wiwerd a	Wiwerd a	Kepala Dinas Kesehatan	Seluruh PD
4	Peningkata n Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN)	Meningka tnya Pengguna an Produk Dalam Negeri	Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri				Sekretaris Daerah: Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Seluruh PD
5	pengendalia n Inflasi	Meningka tnya perekono mian lokal	Laju Pertumbuh an Ekonomi	3,80	3,50	80	Sekretaris Daerah: Kepala Bagian Ekonomi, Pembangun an dan SDA	Seluruh PD
			PDRB Per kapita	75,00	65,20	66,57	Sekretaris Daerah: Kepala Bagian Ekonomi, Pembangun an dan SDA	Seluruh PD
		Meningka tnya pertumb uhaneko nomi sektor unggulan	Laju pertumbuh an PDRB sektor industri pengolahan	1,51	3,90	4,10	Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu,	Seluruh PD
			Laju pertumbuh an PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	1,51	3,90	4,10	1. Kepala Dinas Perikana n; 2. Kepala Dinas Pertania n dan Pangan	Seluruh PD
			Laju pertumbuh an PDRB sektor penyediaan akomodasi makanan dan minuman	13,08	3,60	3,80	Kepala Dinas Kebudayaa n dan Pariwisata.	Seluruh PD

		Meningkatnya Daya saing Daerah	Indeks Daya Saing Daerah	2,53	1,62	1,63	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan	Seluruh PD
--	--	--------------------------------	--------------------------	------	------	------	--------------------------------------	------------

BAB IV
MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

IV.1 Pelaksanaan Reformasi Birokrasi:

Dalam rangka percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Pemerintah Kabupaten Belitung Timur telah membentuk Tim untuk mengawal pelaksanaan yang berfokus pada pencapaian Sasaran/tujuan/indikator/program Reformasi Birokrasi, dengan susunan Tim sebagai berikut:

SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2023-2024
Tim Reformasi Birokrasi Kabupaten Belitung Timur:

Tabel 4.1

Tim Reformasi Birokrasi Kabupaten Belitung Timur		
No	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1.	Bupati Belitung Timur	Pengarah I
2.	Wakil Bupati Belitung Timur	Pengarah II
3.	Sekretaris Daerah	Ketua Tim Reformasi Birokrasi
4.	Asisten Administrasi Umum	Wakil Ketua Tim Reformasi Birokrasi
5.	Kepala Bagian Organisasi	Sekretaris Tim Reformasi Birokrasi
Koordinator dan pelaksana Reformasi Birokrasi General:		

Koordinator dan pelaksana Reformasi Birokrasi General:

Tabel 4.2

No.	Kegiatan Utama	Indikator Kinerja Utama	Unit Satuan Kerja	
			Koordinator	Pelaksana/ Anggota
1.	Penyederhanaan Birokrasi	Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi	Sekretaris Daerah Kepala Bagian Organisasi	Seluruh PD
2.	Pelaksanaan Bekerja Sistem Kerja Baru dan fleksibilitas	Tingkat Implementasi Sistem kerja Baru dan	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Seluruh PD

	Bekerja Pegawai ASN	Fleksibilitas Bekerja Pegawai		
3.	Pelaksanaan Arsitektur SPBE	Indeks SPBE	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Seluruh PD
		Tingkat Implementasi Inisiatif Strategi Arsitektur SPBE	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Seluruh PD
4.	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	Indeks Perencanaan pembangunan	Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Seluruh PD
		Nilai SAKIP	Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Seluruh PD
5.	Pembangunan Zona Integritas di Unit	Tingkat Keberhasilan pembangunan ZI	Inspektur Daerah	Seluruh PD
6.	Penguatan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP	Inspektur Daerah	Seluruh PD
7.	Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (SP4N)	1. Inspektur Daerah 2. Sekretaris Daerah: Kepala Bagian Organisasi 3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Seluruh PD
8.	Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Survei Penilaian Integritas (SPI)	Inspektur Daerah	Seluruh PD
9.	Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	Indeks Kualitas Kebijakan	Sekretaris Daerah: Kepala Bagian Hukum	Seluruh PD
10.	Pelaksanaan Pembentukan Peraturan	Indeks Reformasi Hukum	Sekretaris Daerah: Kepala Bagian Hukum	Seluruh PD

11.	Pelaksanaan Arsip Digital	Tingkat Digitalisasi Arsip	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Seluruh PD
12.	Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Seluruh PD
13.	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Sekretaris Daerah: Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Seluruh PD
14.	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Opini BPK	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Seluruh PD
		Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	Inspektorat Daerah	Seluruh PD
15.	Penataan Jabatan Fungsional	Tingkat Penerapan Kebijakan Transformasi Jabatan Fungsional	Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia	Seluruh PD
16.	Penguatan Manajemen Talenta ASN	Tingkat Implementasi Manajemen Talenta	Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia	Seluruh PD
17.	Penguatan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit	Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia	Seluruh PD
18.	Pelaksanaan Core Values ASN	Indeks BerAKHLAK	Sekretaris Daerah: Kepala Bagian Organisasi	Seluruh PD
		Employee Branding	Sekretaris Daerah: Kepala Bagian Organisasi	Seluruh PD
19.	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Sekretaris Daerah: Kepala Bagian Organisasi	Seluruh PD
		Indeks Pelayanan Publik	Sekretaris Daerah: Kepala Bagian Organisasi	Seluruh PD
20.	Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital	Tingkat Implementasi Kebijakan Transformasi Digital MPP	Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Seluruh PD

Koordinator dan Pelaksana Reformasi Birokrasi Tematik:

Tabel 4.3

No	Tema	Sasaran Tematik	Indikator Sasaran Tematik	Unit Satuan Kerja	
				Koordinator	Pelaksana
1	Penanggula ngan kemiskinan	Menurunny a Tingkat Kemiskinan	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Seluruh PD
			Indeks Keparahan Kemiskinan	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Seluruh PD
		Terwujudny a Pemerataan Perlindungan dan jaminan sosial	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Seluruh PD
			Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagaker jaan	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Seluruh PD
			Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Seluruh PD
2	Peningkatan Investasi	Meningkatn ya investasi Daerah	Nilai Investasi tahunan berskala nasional (PMA/PMD N)	Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Seluruh PD

		Meningkatn ya Daya Saing Daerah	Indeks Daya Saing Daerah	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan ,Penelitian dan Pengembanga n Daerah	Seluruh PD
3	Digitalisasi Administراس i Pemerintah an- Stunting	Pencegahan Stunting	Penurunan Prevalensi Stunting	Kepala Dinas Kesehatan	Seluruh PD
			Kabupaten Sehat	Kepala Dinas Kesehatan	Seluruh PD
4	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN)	Meningkatn ya Penggunaan Produk Dalam Negeri	Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri	Sekretaris Daerah: Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Seluruh PD
5	dan pengendalia n Inflasi	Meningkatn ya perekonomi an lokal	Laju Pertumbuha n Ekonomi	Sekretaris Daerah: Kepala Bagian Ekonomi, Pembangunan dan SDA	Seluruh PD
			PDRB Per kapita	Sekretaris Daerah: Kepala Bagian Ekonomi, Pembangunan dan SDA	Seluruh PD
		Meningkatn ya pertumbuha n ekonomi sektor unggulan	Laju pertumbuha n PDRB sektor industri pengolahan	Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu.	Seluruh PD
			Laju pertumbuha n PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	1. Kepala Dinas Perikanan; 2. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan	Seluruh PD
			Laju pertumbuha n PDRB sektor penyediaan akomodasi makanan dan minuman	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Seluruh PD

		Meningkatn ya Daya saing Daerah	Indeks Daya Saing Daerah	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan	Seluruh PD
--	--	---	--------------------------------	---	------------

Tim Reformasi Birokrasi Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023-2024, melaksanakan tugas:

- a. Pengarah:
 - 1. mengarahkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
 - 2. menetapkan Rencana Kegiatan Reformasi Birokrasi; dan
 - 3. bertanggungjawab atas seluruh pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi.
- b. Ketua:
 - 1. memberikan arahan terkait pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
 - 2. membuat rumusan untuk mengembangkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi; dan
 - 3. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Penanggungjawab Tim Reformasi Birokrasi.
- c. Wakil Ketua:
 - 1. mengoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi; dan
 - 2. mengoordinasikan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim Reformasi Birokrasi.
- d. Sekretaris:
 - 1. membantu tugas-tugas Ketua Tim dalam mengkoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
 - 2. membantu mempersiapkan materi/bahan arahan guna kelancaran dan optimalnya pelaksanaan tugas Ketua tim;
 - 3. membantu Ketua Tim dalam membuat rumusan untuk mengembangkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi; dan
 - 4. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Ketua Tim.
- e. Koordinator:
 - 1. melakukan pengawasan dan memberi pengarahan teknis untuk pelaksanaan kerja kepada anggota Tim;
 - 2. memberi bimbingan teknis dan saran kepada anggotanya supaya pelaksanaan pekerjaan berjalan lancar;
 - 3. melakukan koordinasi hasil perkerjaan secara rutin;
 - 4. mengetahui target pekerjaan yang dikerjakan; dan
 - 5. bertanggung jawab atas penyelesaian pekerjaan yang dilaksanakan oleh anggotanya.

f. Pelaksana/Anggota:

1. menyiapkan dan mengumpulkan bahan/data untuk perencanaan dan pelaksanaan reformasi birokrasi;
2. menganalisis bahan/data perencanaan dan pelaksanaan reformasi birokrasi; dan
3. mengkoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi.

IV.2 Mekanisme Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi:

A. Pelaksanaan monitoring dilakukan pada kegiatan dalam Rencana Aksi Pemerintah Daerah yang melekat pada Perangkat Daerah tertentu, monitoring tersebut dilakukan melalui media:

1. Pertemuan rutin yang dipimpin langsung oleh Kepala Perangkat Daerah setidaknya setiap satu bulan sekali;
2. Survey rutin, khusus terkait dengan bidang tugas atau pelayanan yang dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah, setidaknya survey dilakukan setahun sekali;
3. Pengelolaan pengaduan;
4. Pengukuran target-target yang telah ditetapkan; dan
5. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi.

Pelaksanaan monitoring dilakukan terhadap seluruh program dan kegiatan sebagaimana direncanakan dalam rencana aksi, dilakukan melalui media:

1. Pertemuan rutin Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dilakukan per triwulan untuk:
 - a. membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian yang perlu dilakukan untuk merespon permasalahan atau perkembangan lingkungan strategis;
 - b. Pengukuran target-target kegiatan Reformasi Birokrasi sebagaimana diuraikan dalam *Road Map* dengan realisasinya; dan
 - c. Pertemuan dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Daerah.
2. Survey rutin melalui internet untuk mengetahui indeks kualitas pelayanan yang dipersepsikan oleh masyarakat;
3. Pengelolaan pengaduan; dan
4. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi oleh masing-masing kelompok kerja pada rapat pleno.

Mekanisme monitoring dilakukan sebagai berikut:

Pada lingkup PD, mekanisme dilakukan sebagai berikut:

1. Setiap unit kerja/koordinator yang ditunjuk untuk mengkoordinasikan kegiatan dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi di masing-masing Perangkat Daerah, wajib melakukan monitoring secara berkala terhadap kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
2. Hasil monitoring dilaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah secara rutin, paling tidak 1 (satu) bulan sekali sekali. Jika terdapat hal penting yang perlu segera ditindaklanjuti, maka dapat langsung dilaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah;
3. Kepala Perangkat Daerah bersama tim Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah menyusun laporan hasil monitoring yang memuat pengukuran atas target atau kegiatan yang tertuang pada rencana kerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi; dan
4. Seluruh hasil monitoring disampaikan kepada kelompok kerja monitoring dan evaluasi yang koordinasikan oleh Inspektorat Daerah.

Pada lingkup Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, mekanisme dilakukan sebagai berikut:

1. Setiap kelompok kerja wajib melakukan monitoring secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan dalam rangka Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Belitung Timur yang menjadi tanggungjawabnya;
2. Hasil monitoring dibahas dalam tingkat kelompok kerja dan disampaikan kepada Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Daerah;
3. Hasil monitoring dibahas dalam pertemuan rutin untuk diputuskan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan;
4. Kelompok kerja melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai tindak lanjut; dan
5. Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Daerah memantau pelaksanaan tindak lanjut.

B. Evaluasi:

Evaluasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada tingkat Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dilakukan setiap 3 (tiga) bulan pada setiap tahunnya (triwulan). Evaluasi dilakukan untuk menilai kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara keseluruhan termasuk tindak lanjut hasil monitoring yang dilakukan pada saat pelaksanaan kegiatan. Evaluasi dilakukan melalui beberapa tahapan

mulai dari unit kerja di PD hingga tingkat Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, sebagai berikut:

- a. Evaluasi semesteran atau tahunan di tingkat Pemerintah Kabupaten Belitung Timur yang dipimpin oleh Ketua Pelaksana Tim Reformasi Birokrasi Kabupaten Belitung Timur untuk membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian kegiatan yang perlu dilakukan pada enam bulan atau satu tahun ke depan, sehingga tidak terjadi permasalahan yang sama atau dalam rangka merespon perkembangan lingkungan strategis. Evaluasi dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh prioritas yang telah ditetapkan pada *Road Map* Reformasi Birokrasi tingkat Kabupaten Belitung Timur; dan
- b. Evaluasi Triwulan di tingkat PD yang dipimpin oleh Kepala PD untuk membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian kegiatan yang perlu dilakukan pada 6 (enam) bulan atau satu tahun ke depan, sehingga tidak terjadi permasalahan yang sama atau dalam rangka merespon perkembangan lingkungan strategis. Evaluasi dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh prioritas yang telah ditetapkan.

Berbagai informasi yang digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan dapat diperoleh dari:

- a. Hasil-hasil monitoring;
- b. Survei kepuasan masyarakat dan persepsi anti korupsi;
- c. Pengukuran target-target kegiatan Reformasi Birokrasi sebagaimana diuraikan dalam *Road Map* dengan realisasinya; dan
- d. Pertemuan dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Daerah.

Hasil evaluasi diharapkan dapat secara terus menerus memberikan masukan terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di tahun-tahun berikutnya. Disamping itu, hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi disetiap instansi menjadi dasar dalam pemberlakuan insentif bagi instansi terkait. Kebijakan terkait ini dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PENUTUP

Reformasi Birokrasi di Kabupaten Belitung Timur dilakukan sebagai upaya dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang dilaksanakan secara cepat, tepat dan profesional serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Pemerintah Kabupaten Belitung Timur melakukan percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang selaras dengan rencana strategis pembangunan dan berupaya mewujudkan meningkatkan pelayanan publik yang bersih efektif dan berdaya saing.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan adanya tuntutan masyarakat yang semakin tinggi, perlu dilaksanakan Reformasi Birokrasi yang mencerminkan perilaku adaptif yaitu cepat menyesuaikan diri dalam menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas serta bertindak proaktif. Perubahan Road Map ini diharapkan dapat membantu keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Belitung Timur, hal ini tidak lepas dari adanya komitmen yang kuat dari seluruh Pimpinan Perangkat Daerah dan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BURHANUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



AMRULLAH, S.H.

NIP.19710602 200604 1 005